

Implementasi Program Perluasan Akses Digital Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Saniyyah Aabidah Febriani (222020100143)

Dosen Pembimbing:

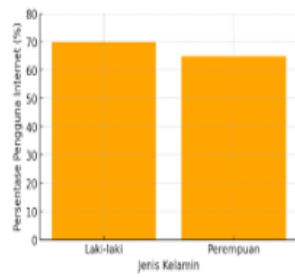
Isna Fitria Agustina, M.Si

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026

Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mendorong perubahan besar di berbagai bidang serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan gender melalui akses pendidikan, informasi, layanan publik, dan partisipasi ekonomi bagi perempuan. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender digital melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan kesetaraan gender dalam pemanfaatan TIK. Transformasi digital juga menjadi pilar pembangunan nasional, ditandai dengan meningkatnya penetrasi internet yang menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2024 telah mencapai 79,5% atau sekitar 221,56 juta pengguna.



Gambar 1. Kesetaraan Gender Dalam Transformasi Digital Tahun 2024
Sumber: *International Telecommunication Union (ITU), 2024 (diolah)*

terlihat adanya kesenjangan gender dalam pemanfaatan teknologi digital pada tahun 2024. Persentase pengguna internet laki-laki mencapai sekitar 70%, sedangkan pengguna perempuan hanya 65%, dengan selisih sekitar 5% atau setara dengan 189 juta pengguna di tingkat global. Perbedaan ini menunjukkan bahwa laki-laki masih memiliki akses dan partisipasi yang lebih tinggi dalam penggunaan teknologi informasi dibandingkan perempuan.

Pendahuluan

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya inklusif dan masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender digital di Indonesia. Kesenjangan digital berbasis gender juga terjadi di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. menunjukkan adanya potensi besar untuk mendorong kesetaraan gender melalui pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, upaya seperti Program Perluasan Akses Digital yang dilaksanakan oleh Dinas (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo menjadi penting untuk memperkecil kesenjangan tersebut dan mewujudkan transformasi digital yang inklusif serta berkeadilan gender. Dalam konteks ini, Dinas (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo menjalankan Program Perluasan Akses Digital yang bertujuan memperkuat literasi digital perempuan, memperluas partisipasi mereka dalam pembangunan, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis teknologi. Program tersebut juga mendukung implementasi kebijakan nasional tentang kesetaraan gender dan transformasi digital yang inklusif.

Tabel 1. Data Penggunaan Internet dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Aspek	Tahun	Jumlah
1.	Penggunaan internet nasional	2024	221.566.500 jiwa / 278.700.000 jiwa
2.	Jumlah penduduk kabupaten Sidoarjo	2024	2.000.000 jiwa
3.	Indeks pembangunan gender (IPG)	2024	94,90 (indeks)
4.	Penggunaan internet laki-laki	2024	2.835.000.000 jiwa
5.	Penggunaan internet Perempuan	2024	2.646.000.000 jiwa
6.	Selisis gender digital global	2024	189.000.000 jiwa

Sumber: Dinas P3AKB Sidoarjo, 2025

Pada tahun 2024, pengguna internet nasional mencapai 221,56 juta jiwa dari 278,7 juta penduduk atau sekitar 79,5%. Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 juta penduduk dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 94,90, menunjukkan potensi besar dalam pemanfaatan teknologi digital. Namun, secara global masih terdapat kesenjangan gender digital, di mana pengguna internet laki-laki mencapai 2,835 miliar jiwa, sedangkan perempuan 2,646 miliar jiwa, selisih sekitar 189 juta jiwa. Data ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi dan pemerataan akses digital untuk mendorong kesetaraan gender.

Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan perluasan akses digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti:

- **keterbatasan infrastruktur internet,**
 - **rendahnya tingkat literasi digital,**
 - **serta pengaruh sosial dan budaya yang masih membatasi peran perempuan di dunia digital.**
- Dalam konteks ini, Program Perluasan Akses Digital dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sidoarjo menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan digital yang masih dialami oleh perempuan. Program Perluasan Akses Digital yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo telah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan literasi digital perempuan, terutama di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan agar perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Penelitian Terdahulu

Faila, Sufa Marhamah, dkk. (2024)

“Implementasi Kesetaraan Gender dan Pemanfaatan Teknologi (Aplikasi Lapor) bagi Digital Society di Kabupaten Banyuwasin”.

menunjukkan bahwa implementasi kesetaraan gender di tingkat lokal belum optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya masyarakat, serta peran pemerintah yang masih rendah dalam isu gender.

Muchsinin, Sjafari, dan Yulianti (2025), **“Implementasi Akses Keterbukaan Informasi Publik Era Digital pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang”**

menemukan bahwa pelayanan publik digital belum sepenuhnya informatif akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan anggaran

Ashya Ravika, Salma Aulia, dkk. (2024), **“Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Implementasi SDGs Kelima di Indonesia”**

menemukan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun semakin tinggi tingkat ekonomi justru diikuti dengan menurunnya kesetaraan gender di beberapa daerah.

Nur Danisa Rahmadani dan Isna Fitriya Agustina (2024), **“Pengembangan Berbasis Gender: Mengubah Dinamika Desa di Indonesia”**

menunjukkan bahwa pembangunan berbasis gender masih belum berjalan secara efektif karena kelemahan dalam komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang belum responsif terhadap gender.

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan digital dan kesetaraan gender memiliki tantangan yang serupa, yakni keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta dukungan kelembagaan yang belum optimal. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini yang menganalisis implementasi Program Perluasan Akses Digital dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sidoarjo, di mana keberhasilan program serupa juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan pemerintah daerah, serta kesadaran digital masyarakat dalam mendukung kesetaraan gender.

Metode

- **Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif**, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi program perluasan akses digital yang responsif gender di Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo.
- **Lokasi penelitian** berada di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo.
- **Sumber Data** diperoleh dari **data primer** (wawancara & observasi) dan **data sekunder** (dokumen kebijakan, laporan, statistik).
- **Subjek penelitian** ditentukan secara *purposive sampling*.
- **Informan** dalam penelitian ini meliputi Ibu Fenny, selaku staf Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, kader atau fasilitator lapangan (kader pemberdayaan perempuan dan kader PKK), serta perwakilan kelompok perempuan penerima manfaat.
- **Teknik pengumpulan data** dilakukan melalui **wawancara mendalam**, **observasi partisipatif**, dan studi **dokumentasi** terhadap dokumen kebijakan, laporan program, serta data statistik terkait kesetaraan gender dan literasi digital.

Metode

- **Teknik analisis data** yang digunakan adalah model interaktif Miles and Huberman, yang meliputi:
 - (a) **Pengumpulan Data**, di mana data yang diperoleh belum dianalisis secara langsung,
 - (b) **Reduksi Data**, tahap ini berfungsi untuk mengarahkan, mengelompokkan, menyaring, dan mengorganisir data yang relevan,
 - (c) **Penyajian Data**, menyusun informasi secara sistematis untuk membantu dalam menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan,
 - (d) **Penarikan Kesimpulan**, tahap akhir dalam analisis data untuk membuat kesimpulan yang didukung oleh bukti yang kuat dari proses pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi program Perluasan Akses Digital di Kabupaten Sidoarjo merupakan inisiatif strategis untuk mendorong kesetaraan gender melalui peningkatan literasi dan partisipasi digital di kalangan perempuan. Implementasi ini dianalisis menggunakan Teori George Edward III, yang berfokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai penentu efektivitas program.

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan tujuan Program Perluasan Akses Digital dapat dipahami dan dijalankan secara merata oleh seluruh kelompok sasaran, khususnya perempuan. Dalam pelaksanaannya, Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penyampaian informasi melalui kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, serta pendampingan bersama kader PKK dan pemerintah desa. Namun demikian, pelaksanaan komunikasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran, terutama perempuan yang berada di wilayah pedesaan

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Hasil Komunikasi Program Perluasan Akses Digital

Aspek Komunikasi	Hasil Penelitian
penyampaian informasi	Informasi program disampaikan melalui sosialisasi langsung dan peran kader PKK di tingkat desa.
Kejelasan pesan	Tujuan program dipahami secara umum, namun penjelasan teknis masih terbatas.
Konsistensi informasi	Informasi yang diterima peserta relatif sama, meskipun kedalaman pemahaman berbeda.
Jangkauan informasi	Penyampaian informasi lebih efektif di wilayah yang mudah dijangkau aparat desa.
Respons peserta	Sebagian perempuan menunjukkan minat mengikuti kegiatan, sementara lainnya masih pasif.

Sumber: Dikelola penulis, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi Program Perluasan Akses Digital telah dilaksanakan melalui sosialisasi langsung dan dukungan kader PKK di tingkat desa. Informasi program pada dasarnya telah diterima oleh perempuan sasaran, namun pemahaman yang diperoleh masih bersifat umum karena penjelasan teknis belum disampaikan secara mendalam. Selain itu, meskipun informasi yang disampaikan relatif sama, tingkat pemahaman peserta menunjukkan perbedaan yang dipengaruhi oleh jangkauan aparat desa dan kondisi wilayah. Respons peserta juga beragam, di mana sebagian perempuan menunjukkan minat untuk terlibat dalam kegiatan, sementara sebagian lainnya menunjukkan tingkat keterlibatan yang masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berlangsung secara lebih efektif dan merata.

Hasil dan Pembahasan

2. Sumber Daya

Sumber daya berperan penting dalam menunjang pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana digital, kualitas jaringan internet, serta dukungan anggaran. Dalam pelaksanaannya, program ini telah dilaksanakan secara rutin, namun ketersediaan sumber daya yang ada masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kebutuhan peserta secara menyeluruh.

Gambar. 1 Ketersediaan Sarana Digital dalam Kegiatan Pelatihan Perempuan



Sumber: Dinas P3AKB Sidoarjo, 2025

Gambar 1. menunjukkan pelaksanaan kegiatan dengan dukungan fasilitator dan sarana yang tersedia. Namun, ketersediaan fasilitas dan jumlah pendamping menunjukkan perlunya penguatan sumber daya agar pelaksanaan program lebih efektif.

Hasil dan Pembahasan

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana dan sasaran program memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi Program Perluasan Akses Digital. menunjukkan bahwa pelaksana program, seperti Dinas P3AKB, kader PKK, dan fasilitator lapangan, memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui pendampingan yang berkelanjutan. Namun, pada tingkat sasaran program, sikap dan motivasi peserta masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Disposisi menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemauan dan penerimaan dari pelaksana maupun peserta.

Gambar 2. memperlihatkan keikutsertaan perempuan dalam kegiatan pelatihan Program Perluasan Akses Digital. Dari kegiatan tersebut terlihat adanya perbedaan tingkat partisipasi dan respons peserta selama proses pelaksanaan program. Sebagian peserta tampak aktif mengikuti materi dan berinteraksi dengan fasilitator, sementara sebagian lainnya menunjukkan keterlibatan yang lebih terbatas. Kondisi ini mencerminkan bahwa kesiapan individu, tingkat kepercayaan diri, serta pengalaman sebelumnya dalam pemanfaatan teknologi digital turut memengaruhi partisipasi perempuan dalam program.

Gambar. 2 Sikap dan Partisipasi Perempuan dalam Mengikuti Pelatihan Literasi Digital



Sumber: Dinas P3AKB Sidoarjo, 2025

Hasil dan Pembahasan

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital mencakup kejelasan SOP, pembagian tugas, koordinasi antarinstansi, serta dukungan kelembagaan dan anggaran. Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo telah memiliki struktur pelaksanaan yang cukup jelas, termasuk koordinasi dengan pemerintah desa, kader PKK, dan pihak pendukung lainnya dalam menjalankan program tersebut. Untuk memastikan program dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan, para peneliti meneliti bagaimana mekanisme tugas, koordinasi, dan kerja dikembangkan.

Gambar. 3 Struktur Pelaksana Program Perluasan Akses Digital



Sumber: Dikelolah Penulis, 2025

Gambar 3. Program Struktur Birokrasi Perluasan Akses Digital menunjukkan hierarki yang jelas, mulai dari Dinas P3AKB sebagai penanggung jawab kebijakan, Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator teknis, pemerintah desa sebagai fasilitator lokal, kader PKK sebagai pendamping lapangan, hingga kelompok perempuan sebagai penerima manfaat. Setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan program. Namun, keberlanjutan pelaksanaan masih dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan kapasitas aparatur di setiap level.

Kesimpulan

Implementasi Program Perluasan Akses Digital yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam kerangka George Edward III, Proses **Komunikasi**, penyampaian informasi program telah dilakukan melalui sosialisasi dan peran kader PKK, namun belum menjangkau seluruh perempuan secara merata, terutama di wilayah perdesaan yang masih menghadapi keterbatasan kepemilikan perangkat digital dan akses jaringan internet. Dari **Sumber daya**, dalam penyelenggaraan program telah didukung oleh fasilitator, sarana pelatihan, dan alokasi anggaran, tetapi jumlah pendamping yang terbatas, infrastruktur digital yang belum merata, serta perbedaan tingkat literasi digital peserta menyebabkan proses pendampingan belum dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Dalam **disposisi**, aparaturnya dan pihak-pihak yang terlibat dalam program menunjukkan komitmen dan sikap yang cukup positif dalam mendorong pemberdayaan perempuan, namun pada tingkat sasaran masih terdapat perbedaan motivasi dan partisipasi yang dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, rasa kurang percaya diri, serta norma sosial yang masih menempatkan perempuan pada peran domestik. Sementara itu dari sisi **Struktur birokrasi**, dan kelembagaan program telah didukung oleh pembagian tugas, prosedur kerja, serta koordinasi antara Dinas P3AKB, pemerintah desa, dan kader PKK, namun keberlanjutan program masih bergantung pada ketersediaan anggaran tahunan dan kapasitas aparaturnya, sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara konsisten dalam jangka panjang.

Referensi

- [1] Indriati Amirullah, “Pengaruh Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dalam Administrasi Publik,” *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 1, No. 4, Pp. 383–391, Dec. 2023, Doi: 10.47861/Sammajiva.V1i4.905.
- [2] K. V. Nayak And S. Alam, “The Digital Divide, Gender And Education: Challenges For Tribal Youth In Rural Jharkhand During Covid-19,” *Decision*, Vol. 49, No. 2, Pp. 223–237, Jun. 2022, Doi: 10.1007/S40622-022-00315-Y.
- [3] B. Kebijakan Fiskal *Et Al.*, “Kajian Pengarusutamaan Gender Analisis Ketimpangan Gender Spasial Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah.” [Online]. Available: <https://fiskal.kemenkeu.go.id>
- [4] “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.”
- [5] W. Adila, F. Hadi, And S. Lancang Kuning, “Kajian Literatur Tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Di Indonesia : Evaluasi Dan Perspektif Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 318, No. 2, 2025, Doi: 10.5281/Zenodo.14913530.
- [6] N. D. Rahmadani And I. F. Agustina, “Pengembangan Berbasis Gender: Mengubah Dinamika Desa Di Indonesia,” *Indonesian Culture And Religion Issues*, Vol. 1, No. 1, P. 20, Jun. 2024, Doi: 10.47134/Diksima.V1i1.34.
- [7] F. S. Marhamah, M. Febrianza, Marleni, And Putriyanti, “Implementasi Kesetaraan Gender Dan Pemanfaatan Teknologi (Aplikasi Laport) Bagi Digital Society Di Ruang Lingkup Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Banyuasin Iii, Kelurahan Pangkalan Balai,” *Kawanad: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Pp. 1–13, Mar. 2024, Doi: 10.56347/Kjpkm.V3i1.137.
- [8] M. Muchsinin, A. Sjafari, Dan R. Yulianti, “Implementasi Akses Keterbukaan Informasi Publik Era Digital Pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang,” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 1, Pp. 52–63, 2025.
- [9] A. Ravika, M. Rhani, P. K. Jurusan, I. Ekonomi, A. S. Aulia, And J. F. Komala, “Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Implementasi Sdgs Kelima Di Indonesia,” 2024.
- [10] A. Suryaningsih and A. H. Sanjaya, “Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender: Strategi dan Tantangan di Era Globalisasi,” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, vol. 4, no. 2, pp. 11–16, 2024.

